

**PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MEMODERASI PENGARUH *EARNINGS
MANAGEMENT* TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun
2008-2010)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

NOOR DZULHIJAH PURNAWANTI
NIM. C2C008208

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Noor Dzulhijjah Purnawanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2008208

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MEMODERASI PENGARUH *EARNINGS*
MANAGEMENT TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

Dosen Pembimbing : Hj. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt

Semarang, 19 Maret 2012
Dosen Pembimbing,

(Hj. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt)
NIP. 19730803 200012 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Noor Dzulhijjah Purnawanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2008208

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MEMODERASI PENGARUH *EARNINGS*
MANAGEMENT TERHADAP PENGUNGKAPAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY***

Dosen Pembimbing : Hj. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 Maret 2012

Tim Penguji

1. Hj. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt (.....)

2. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt (.....)

3. Herry Laksito, S.E., Madv., Acc., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Noor Dzulhijjah Purnawanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Peran *Corporate Governance* Dalam Memoderasi Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI PadaTahun 2008-2010) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

(Noor Dzulhijjah Purnawanti)
NIM : C2C008208

ABSTRACT

This research was aimed to examine empirically: (1) The influence of earnings management to CSR disclosure (2) The role of corporate governance mechanism as moderating variable in the relationship between earnings management and CSR disclosure. Corporate governance mechanism was analyzed by proportion of independent commissioner, the number of audit committee meetings and institutional ownership. Earnings management was measured by discretionary accruals use Modified Jones Model and the extent of CSR was measured used corporate social disclosure index (CSDI) based on Global Reporting Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies annual report.

This research used samples on manufacturing companies among 2008-2010 by using purposive sampling method. Data used in this study was taken from annual reports and sustainable reports of manufacturing companies listed on the IDX. There are 75 companies among 2008-2010 which fulfilling. The method of analysis of this research was multiple regression. This method was chosen because the independent variables are more than one and all the data of the variables are metric.

The reseach found no significant statistical effect from various measurement of earnings management to CSR disclosure. The research also found there is no significant effect on proportion of independent commissioner and institutional ownership in relationship between EM and CSR Disclosure. Meanwhile, the number of audit committe meetings has significant effect the relationship between EM and CSR disclosure. The founds used by investors and creditors to make investment and credit decision. The research contributed to the literature in that has shown that CSR disclosure is driven by the desire to fulfill stakeholders expectation and not caused earnings management. However, this research found that the corporate governance mechanism didn't work effectively, so it's suggested that creditors and investors to be more careful in analyzing a financial reporting.

Key words: *Earnings Management, Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Governance Mechanism, Manufacturing Companies.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (1) pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR (2) peran *corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR. Mekanisme *corporate governance* dianalisis dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan institusional. *Earnings management* diukur dengan menggunakan *discretionary accrual* dengan menggunakan model Modified Jones. dan luas pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan *Corporate Social Disclosure Index* (CSDI) berdasarkan item standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur selama tahun 2008-2010 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan laporan berkelanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI . Terdapat 75 perusahaan selama tahun 2008-2010 yang memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Metode ini dipilih karena variabel independen lebih dari satu dan semua data dari variabel adalah metrik.

Penelitian ini menemukan hasil statistik yang tidak signifikan dari pengaruh pengukuran *earnings management* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional dalam hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR. Sementara jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR. Penemuan ini digunakan oleh investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Penelitian ini memberikan kontribusi literatur yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR didorong oleh adanya keinginan untuk memenuhi harapan *stakeholder* dan tidak dikarenakan manajemen laba. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* tidak efektif, sehingga disarankan bahwa kreditor dan investor harus lebih hati-hati dalam menganalisis laporan keuangan.

Kata kunci : Earnings Management, Pengungkapan CSR, Mekanisme *Corporate Governance*, Perusahaan Manufaktur.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al Baqarah: 153)

“Jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi janganlah menunggu sore.” (H.R. Bukhori)

“Man Jadda Wa Jadd”

Kau Kan Mendapatkan Apa Yang Kau Usahakan

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

*Mama tercinta yang
dengan ikhlas merawatku dari
aku kecil sampai sekarang dan
selalu senantiasa mendoakanku*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “ **PERAN CORPORATE GOVERNANCE DALAM MEMODERASI PENGARUH EARNING MANAGEMENT TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**” ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Hj. Siti Mutmainah, SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat kepada penulis.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Wali.
4. Bapak Puji Harto, S.E., M.Si, Akt selaku Dosen yang mengampu mata kuliah Seminar Akuntansi yang banyak memberikan masukan serta motivasi bagi penulis.
5. Mama dan Almarhum Bapak yang terkasih. Terimakasih untuk kasih sayang, perjuangan,perhatian serta doa yang selalu diberikan untuk kesuksesan penulis.

6. Mas Doni, Mbak Irra, Mas Soni, Mbak Novi, Mas Tinton, Mbak Dyah, Abil, Ayang, Sekar, Kak Nishfa, Dek Fikar, Mbak Icha, Mas Raihan, Dek Radit dan seluruh keluarga besar. Terimakasih atas dukungan, doa dan hari-hari indah yang ditorehkan kepada penulis.
7. Heru Cahyana. Terimakasih atas kebaikan, pengorbanan dan kesediaan dalam mendengarkan setiap curahan hati penulis.
8. Para Sahabatku: Ema, Berlin, Seni, Tetty, Tyas. Terimakasih atas segala bantuan, kebersamaan, motivasi, dan hari-hari indah selama dikampus. Semoga kita bisa menggapai kesuksesan bersama dan tetap mempertahankan persahabatan yang dijalin selama ini.
9. Anggun, Anti, Esy, Ayu, Ratri, Febri, Shinta, Ichlas. Terimakasih atas segala bantuan yang pernah diberikan selama di perkuliahan. Semoga kita dapat tetap menjaga pertemanan ini.
10. Teman-teman seperjuang. Deffa, Johan, Arum, Gagat, Rizky Syahfandi. Terimakasih atas segala bentuk motivasi dan informasi yang diberikan selama bimbingan.
11. Linda. Terimakasih atas kebersamaan dan kisah-kisah seru di akhir perkuliahan ini yang membuat penulis semakin ceria.
12. Mas Anton. Terimakasih atas segala bantuan, motivasi, kasih sayang, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.
13. Mas Ageng. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Mas Imam. Terimakasih atas segala motivasi dan informasi yang diberikan selama kegiatan perkuliahan.

15. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler II angkatan 2008 kelas A dan B.

Terima kasih untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah.

16. Tim KKN II Desa Penawangan. Terimakasih atas pembelajaran hidup selama 35 hari, sungguh kebersamaan yang sangat berarti.

17. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian berikan.

Penulis memohon maaf sekiranya penyajian maupun pembahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihakpihak yang berkepentingan, khususnya bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

(Noor Dzulhijjah Purnawanti)

NIM: C2C00820

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.1.2 Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>).....	16
2.1.3 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	17
2.1.4 <i>Corporate Social Responsibility</i>	18
2.1.5 Pengungkapan CSR.....	19
2.1.6 <i>Earnings Management</i>	21
2.1.7 <i>Corporate Governance</i>	23
2.1.8.1 Dewan Komisaris.....	25

2.1.8.2 Komite Audit.....	28
2.1.8.3 Kepemilikan Institusional	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	34
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	35
2.4.1 Pengaruh <i>Earnings Management</i> terhadap Pengungkapan CSR	35
2.4.2 Peran Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dalam memoderasi	36
pengaruh <i>Earnings management</i> terhadap pengungkapan CSR	
2.4.2.1 Proporsi Komisaris Independen	37
2.4.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit	39
2.4.2.3 Kepemilikan Institusional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.1.1 Variabel Independen.....	43
3.1.2 Variabel Moderating	45
3.1.3 Variabel Dependen	47
3.1.4 Variabel Kontrol	48
3.1.4.1 Ukuran Perusahaan.....	48
3.1.4.2 Profitabilitas	49
3.1.4.3 <i>Leverage</i>	50
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
3.2.1 Populasi Penelitian	50
3.2.2 Sampel Penelitian.....	51
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.5 Metode Analisis	52
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	53
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	53
3.5.2.1 Uji Normalitas	54
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	54

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	55
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	56
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	56
3.5.4 Uji Hipotesis	58
3.5.4.1 Uji Statistik F.....	58
3.5.4.2 Uji Statistik t.....	58
3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	60
4.2 Analisis Deskriptif	61
4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	66
4.3.1 Pengujian Asumsi Klasik	66
4.3.1.1 Uji Normalitas	66
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas	68
4.3.1.3 Uji Heterokedastisitas.....	69
4.3.1.4 Uji Autokorelasi	71
4.3.2 Pengujian Hipotesis	72
4.3.2.1 Analisis Regresi Berganda	72
4.3.2.2 Uji Signifikansi Simultan (uji-F).....	73
4.3.2.3 Uji signifikansi parameter individual (Uji-T)	73
4.3.2.4 Koefisien Determinasi	75
4.4 Pembahasan	76
4.5 Implikasi.....	81
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Keterbatasan Penelitian	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	42
Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian.....	60
Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	61
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian Setelah Mengeluarkan Outlier	62
Tabel 4.4 Indikator Pengungkapan CSR	63
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4.6 Uji Glejser	70
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Stuktur Board of Director (BoD) dalam <i>One Tier System</i>	26
Gambar 2.2 Struktur BoD dan BoC dalam <i>Two Tiers System</i> yang berkembang di Indonesia	27
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1 Pengungkapan CSR.....	64
Gambar 4.2 Uji Normalitas	67
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel	91
LAMPIRAN B Item-Item Pengungkapan CSR	97
LAMPIRAN C Perhitungan <i>Discretionary Accrual</i>	98
LAMPIRAN D Perhitungan Nilai Beta	102
LAMPIRAN E Hasil Output SPSS	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah mengemuka dan mendapatkan perhatian tersendiri dari masyarakat. Tuntutan masyarakat serta perkembangan arus globalisasi, dan pasar bebas telah mendorong kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Masyarakat sebagai salah satu bagian dari *stakeholder* berhak mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan berupa upaya perbaikan atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) untuk mewujudkan tuntutan masyarakat tersebut.

Perusahaan semakin menyadari pentingnya penerapan program *Corporate Social and Responsibility* (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Survey global yang dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa 85 persen eksekutif senior dan investor dari berbagai organisasi menjadikan CSR sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Warta Ekonomi, 2006). Sejalan dengan hal tersebut, Nurdin dan Cahyandito (2007) menyatakan agar perusahaan dapat lebih bersaing, maka harus lebih transparan dalam mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga akan lebih membantu para pengambil keputusan dalam mengantisipasi

kondisi yang semakin berubah. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan mulai menerapkan program dan mengungkapkan aktivitas CSR.

Pentingnya aktivitas dan pengungkapan CSR juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur ketentuan tentang pengungkapan CSR bagi perusahaan. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 dan 74, menyatakan bahwa pelaksanaan dan pengungkapan CSR bersifat wajib. Hal tersebut berarti bahwa setiap perusahaan, terutama yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan. Namun demikian, Cheng dan Cristiawan (2011) memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa meskipun pelaksanaan dan pengungkapan CSR diwajibkan oleh UU No. 40 tahun 2007 namun item-item yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela/*voluntary*.

Pengungkapan CSR merupakan mekanisme yang penting dalam suatu perusahaan untuk menunjukkan transparansi bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingannya sendiri melainkan berkontribusi dan menjaga kepentingan *stakeholder* maupun lingkungan. Gray *et al.*, (1995) dalam Salama *et al.*, (2010) menyatakan bahwa pengungkapan CSR adalah mekanisme yang dapat digunakan sebagai komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders* serta memperbaiki legitimasi kegiatan perusahaan di mata masyarakat.

Pengungkapan CSR merupakan salah satu keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Cheng dan Christiawan, 2011). Salah satu tujuan perusahaan

melakukan pengungkapan CSR adalah untuk memberikan *image* yang baik terkait dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya baik bagi *stakeholder* maupun lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung pengungkapan CSR dilakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian investor dan *stakeholder*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Eipstein dan Freedman (1994) yang menemukan bahwa investor individual tertarik terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. Hal ini berarti bahwa pengungkapan CSR akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan berupa penilaian positif dari investor maupun *stakeholder* karena kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dan lingkungan. Namun demikian, menurut penelitian yang dilakukan Prior *et al.*, (2008) *image* positif dari masyarakat maupun *stakeholder* lainnya yang timbul akibat adanya aktivitas CSR, justru digunakan sebagian manajer untuk mengalihkan isu dari para *stakeholder*, terutama ketika mereka mencoba terlibat dalam praktek *earnings management* (EM). Lebih lanjut Prior *et al.*, (2008) menyatakan bahwa manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas dalam rangka menarik investor dan mengalihkan pengawasan dari beragam kelompok *stakeholder* atas tindakan EM.

Earnings management (manajemen laba) merupakan tindakan manajer dalam melakukan diskresioner atas laba perusahaan. Healy dan Wahlen (1999 hal 366) menyatakan bahwa situasi EM terjadi ketika para manajer menyesatkan beberapa *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada pelaporan angka akuntansi. Manajer sebagai

pengendali perusahaan memiliki informasi yang lebih detail mengenai kondisi perusahaan. Hal tersebut menimbulkan adanya asimetri informasi antara manajer dengan *stakeholder*. Situasi demikian mendorong manajer untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang bersifat oportunitis yang merugikan *stakeholder*, baik dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun perekayasaan kinerja perusahaan.

Tindakan EM yang dilakukan oleh manajer dapat diminimalisir oleh adanya suatu mekanisme *corporate governance* (CG). Beberapa penelitian terdahulu telah mendokumentasikan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba (Wild, 1996; Dechow *et al.*, 1996; Klein, 2002). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keandalan dan kualitas laba akuntansi akan meningkat ketika perilaku oportunistik manajer dalam melakukan EM dipantau oleh mekanisme *corporate governance*. Selain itu, *corporate governance* juga memberikan suatu mekanisme yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni *et al.*, 2004).

Terdapat beberapa mekanisme *corporate governance* yang mampu mengontrol perilaku EM oleh manajer yang berawal dari adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. Pertama, dengan meningkatkan proporsi komisaris independen. Hal tersebut berdasarkan penelitian Klein (2002) yang menemukan bahwa dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka tindakan pengawasan semakin meningkat

sehingga dapat mengurangi tindakan EM. Kedua, meningkatkan jumlah rapat yang dilakukan komite audit. Komite audit yang semakin aktif memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen. Pernyataan ini didukung oleh Xie *et al.*, (2003) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau akrual diskresioner jangka pendek. Ketiga, kepemilikan saham oleh institusional, Mediastry dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan EM.

Beberapa penelitian empiris sebelumnya banyak berfokus pada pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan atau *corporate financial performance* (CFP). Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian pengaruh EM terhadap pengungkapan CSR serta peran *corporate governance* dalam memoderasi kedua variabel tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh EM terhadap CSR telah dilakukan sebelumnya oleh Prior *et al.*, (2008) dan Chih *et al.*, (2008). Prior *et al.*, (2008) meneliti hubungan CSR dan EM dengan dasar asumsi, praktek EM akan memiliki dampak negatif terhadap hubungan perusahaan dengan *stakeholder* serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan kepuasan *stakeholder*, perusahaan berusaha melakukan praktek CSR. Penelitian ini membuktikan adanya hubungan positif antara CSR dengan

EM. Dari penemuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan EM berusaha untuk mengelabui *stakeholder* dengan melibatkan diri secara proaktif dalam kegiatan CSR.

Chih *et al.*, (2008) menguji empat hipotesis yang menghubungkan EM dengan CSR. *Myopia avoidance hypothesis*, berdasarkan hubungan negatif yang terjadi antara EM dan CSR, *predictable earnings hypothesis*, *multiple earnings hypothesis* yang menunjukkan hubungan positif antara EM dan CSR, dan yang terakhir adalah *institutional hypothesis* yang menunjukkan hubungan netral antara CSR dan EM. Dalam menguji hubungan EM dan CSR, Chih *et al.*, (2008) menggunakan tiga proksi untuk mengukur EM, antara lain *earnings smoothing*, *earnings aggressiveness*, dan *earnings losses avoidance*. Penelitian tersebut menemukan adanya perbedaan pengaruh EM terhadap CSR untuk ketiga proksi tersebut. EM yang diproksikan dengan *earnings smoothing* dan *earnings losses avoidance* menunjukkan pengaruh negatif terhadap CSR sehingga hal tersebut mendukung *myopia avoidance hypothesis*. EM yang diproksikan dengan *earnings aggressiveness* menunjukkan pengaruh positif terhadap CSR sehingga hal tersebut mendukung *multiple objective hypothesis*.

Penelitian penting lainnya dipublikasikan oleh Salama *et al.*, (2010) yang menguji pengaruh EM terhadap CSR yang diproksikan dengan CED, serta peran CG dalam memoderasi pengaruh EM terhadap CED. Salama *et al.*, (2010) mengasumsikan bahwa manajer memiliki insentif yang lebih luas untuk melakukan CED dalam rangka mengamankan kinerja mereka, terutama ketika mereka terlibat dalam praktek EM. Dalam mengurangi praktek EM yang

dilakukan oleh manajer, Salama *et al.*, (2010) menggunakan mekanisme *corporate governance* antara lain ukuran dewan direksi (*board size*) dan jumlah rapat komite audit. Dalam penelitian ini Salama *et al.*, (2010) juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Dari penelitian yang dilakukan, Salama *et al.*, (2010) menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* yang diproksikan oleh jumlah rapat komite audit mampu memperlemah pengaruh EM terhadap CED. Namun demikian, mereka tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara EM terhadap CED serta ukuran dewan direksi dalam memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut.

Penelitian lainnya dilakukan di Indonesia oleh Handajani *et al.*, (2008) yang menguji pengaruh *earnings management* dan *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *earnings management* dan *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prior *et al.*, (2008), Chih *et al.*, (2009), Salama *et al.*, (2010) dan Handajani *et al.*, (2008) dapat disimpulkan bahwa terdapat kontradiktif dari hasil penelitian mereka. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh EM terhadap pengungkapan CSR serta peran CG dalam memoderasi kedua variabel tersebut guna menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Salama *et al.*, (2010) dengan *setting* penelitian di Inggris. Berbeda dengan penelitian Salama *et al.*, (2009) yang menggunakan variabel CED sebagai proksi CSR, dalam penelitian ini peneliti memperluas variabel dependen menjadi

pengungkapan CSR. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan kegiatan CSR. Ini berarti bahwa perusahaan dalam mengungkapkan aktivitasnya tidak hanya terfokus pada lingkungan melainkan pada aktivitasnya yang berkaitan dengan karyawan, masyarakat, keamanan produk dan juga para pemegang saham. Variabel pengungkapan CSR ini juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Handajani *et al.*, (2008). Berbeda dengan penelitian Salama *et al.*, (2010) yang menggunakan variabel ukuran dewan komisaris sebagai salah satu proksi *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan variabel proporsi komisaris independen, hal tersebut dikarenakan keberadaan komisaris independen mampu memberikan pengawasan yang lebih terhadap perilaku manajer. Hal ini didukung oleh penelitian Klein (2002) yang menemukan bahwa keberadaan komisaris independen mampu mengurangi tindakan oportunistik manajer seperti EM. Hal lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Salama *et al.*, (2010) adalah penambahan variabel kepemilikan institusional sebagai proksi *corporate governance*. Tambahan proksi kepemilikan institusional ini berdasarkan penelitian Madiastuty dan Mahfoedz (2003). Penelitian tersebut menemukan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk memanipulasi laba menjadi berkurang.

Selain adanya ketidakkonsistenan dari hasil penemuan sebelumnya, penelitian ini dilakukan karena masih sedikit penelitian di Indonesia yang mengkaji pengaruh EM terhadap Pengungkapan CSR serta peran CG dalam

memoderasi kedua variabel tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2008-2010. Penggunaan perusahaan manufaktur sebagai sampel dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang memberikan dampak yang besar bagi lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Earnings management (EM) merupakan tindakan oportunistik yang mendapat perhatian dari elemen *stakeholder*. Manajer mengambil keuntungan dari fleksibilitas metode akuntansi untuk mengelola laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Gargouri *et al.*, 2010 dalam Maharani 2011). Manajer dapat membuat laba yang disajikan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari realisasinya. Hal tersebut tergantung dari kepentingan yang sedang dihadapi oleh manajer. Namun demikian perusahaan yang melakukan tindakan EM berupaya untuk tetap menjaga reputasi, salah satunya dengan melibatkan perusahaan dalam kegiatan CSR.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan hubungan EM dengan CSR, antara lain penelitian yang dilakukan Chih *et al.*, (2008), Prior *et al.*, (2008), Salama *et al.*, (2010) dan Handajani *et al.*, (2008). Chih *et al.*, (2008) menguji pengaruh EM terhadap CSR dan menemukan hasil yang berbeda ketika EM diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu *earnings smoothing*, *earnings aggressiveness* dan *earnings losses avoidance*. EM yang diproksikan dengan *earnings smoothing* dan *earnings losses avoidance* menunjukkan pengaruh negatif terhadap CSR sedangkan EM yang diproksikan dengan *earnings aggressiveness*

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap CSR. Penelitian yang dilakukan Prior *et al.*, (2008) membuktikan adanya pengaruh positif antara CSR dengan EM. Prior *et al.*, (2008) menyatakan bahwa manajer yang terlibat dalam manajemen laba, dapat mengkompensasikan tindakannya dengan melibatkan perusahaan dalam kegiatan CSR. Tindakan tersebut dilakukan untuk mengalihkan perhatian para *stakeholder* dari pengawasan manipulasi laba.

Penelitian penting lainnya dipublikasikan oleh Salama *et al.*, (2010) yang meneliti pengaruh EM terhadap CED sebagai salah satu proksi CSR serta peran CG dalam memoderasi pengaruh EM terhadap CED. Penelitian tersebut menemukan bahwa *corporate governance* yang diproksikan oleh jumlah rapat komite audit mampu memperlemah pengaruh EM terhadap CED dalam suatu perusahaan. Namun demikian, Salama *et al.*, (2009) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara EM terhadap CED serta ukuran dewan direksi dalam memoderasi pengaruh kedua variabel tersebut.

Penelitian Handajani *et al.*, (2008) menguji pengaruh *earnings management* dan *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian tersebut membuktikan bahwa *earnings management* dan *corporate governance* yang diproksikan oleh komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan masih terdapat hasil yang kontradiktif. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk menguji kembali penelitian tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dibahas diatas, maka perumusan masalah akan dikemukakan sebagai berikut :

1. Apakah *earnings management* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?
2. Apakah proporsi komisaris independen berperan dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berperan dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR?
4. Apakah kepemilikan institusional berperan dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR.
2. Untuk memberikan bukti empiris peran proporsi komisaris independen dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR.
3. Untuk memberikan bukti empiris peran jumlah rapat komite audit dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR.
4. Untuk memberikan bukti empiris peran komite institusional dalam memoderasi pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi terutama bagaimana *corporate governance* memonitoring tindakan *earnings management* dalam mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan untuk pengungkapan CSR dalam laporan tahunnya.
2. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman tentang pentingnya pengungkapan CSR sehingga dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi regulator, memberikan masukan atas efektivitas penerapan UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 dan pasal 74 terhadap perusahaan go publik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada buku pedoman penyusunan skripsi, yang terbagi menjadi lima bab, dengan susunan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bagian awal dalam penelitian yang menyajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini menguraikan tentang variabel-variabel dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan mengenai objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian berikutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sulistyanto (2008) menyatakan *agency theory* merupakan sebuah kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). *Principal* akan mendelegasikan wewenang dalam hal pengelolaan perusahaan kepada *agent*. Pendelegasian wewenang ini menjadi keharusan dalam hubungan agensi agar manajer mempunyai kesempatan yang luas untuk menjalankan tugasnya, sekaligus mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan kepada pemilik perusahaan. Hubungan agensi ini seharusnya dapat membuat perusahaan meningkatkan nilainya karena dikelola oleh orang yang mengetahui dan memahami bagaimana menjalankan usaha serta diawasi secara ketat oleh pemilik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Meisser *et al.*, (2006) menjelaskan adanya permasalahan yang timbul karena adanya hubungan keagenan yang memisahkan fungsi kepemilikan oleh *principal* dan pengendalian oleh *agent*. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain : (a) terjadinya informasi asimetris karena pada umumnya manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, hal tersebut karena manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik guna memaksimalkan keuntungan pribadi (Ujiyantho, 2007). Tindakan oportunistik manajemen, seperti manajemen laba merupakan permasalahan keagenan yang dapat menyesatkan *stakeholder* khususnya investor mengenai nilai pasar perusahaan dan posisi keuangan sehingga memungkinkan investor membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, manajemen laba dipandang sebagai suatu *agency cost* (Zahra *et al.* , 2005; Xie *et al.*, 2003). *Agency cost* (biaya keagenan) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sulistyanto 2008). Di sisi lain, Dechow, *et al.* (1996) menyatakan bahwa ketika perusahaan dicurigai melakukan tindakan manajemen laba, nilai perusahaan akan segera berkurang di pasar saham.

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara agen dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan guna menyelaraskan kepentingan yang ada dalam suatu perusahaan (Ebrahim, 2007). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi ini adalah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga hal tersebut dapat meyakinkan investor bahwa mereka akan memperoleh *return* atas dana yang diinvestasikan. Dengan kata lain, *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam teori keagenan, selain mekanisme *corporate governance*, perusahaan dapat menggunakan metode yang berbeda seperti rencana kompensasi atau pengungkapan sukarela untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Salama *et al.*, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh McGuire *et al.*, (1988) yang menyatakan bahwa aktivitas CSR yang diungkapkan perusahaan mampu meningkatkan reputasi perusahaan serta hubungan baik dengan *stakeholder* sehingga pada akhirnya akan memperluas akses pembiayaan modal dan peningkatan nilai pemegang saham.

2.1.2 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder theory menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholder* memiliki peranan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan yang diberikan *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Pada dasarnya *stakeholder* memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber-sumber ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, “ketika *stakeholder* mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan *stakeholder*” (Ulman 1982, hal. 552 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Hill dan Jones (1992) menyatakan bahwa manajer dalam perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai agen dari pemilik, melainkan juga sebagai agen dari

stakeholder lainnya. Manajer yang melakukan tindakan manajemen laba dengan mengorbankan kepentingan *stakeholder*, memiliki risiko tertentu. Para *stakeholder* akan merespon kepada manajemen dalam hal kepentingan mereka yang dikorbankan dalam praktek-praktek manajemen laba. Oleh karena itu, manajer memiliki insentif untuk membuat laporan keuangan yang lebih luas dan informatif, sehingga hal ini menghindarkan mereka dari ancaman tindakan disipliner dari *stakeholder* (Salama *et al.*, 2010). Deegan (2004) menjelaskan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja sosial, lingkungan dan intelektual mereka untuk memenuhi ekspektasi yang diakui oleh *stakeholder*. Sejalan dengan hal tersebut Gray *et al.*, (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengemukakan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*.

2.1.3 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi dilandasi oleh adanya suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Deegan (2000) dalam Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (Ashforth dan Gibbs 1990; Dowling dan Pfeffer 1975; O'Donafan 2002 dalam Ghozali dan Chariri, 2007).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan aktivitas dan pengungkapan CSR. Pengungkapan aktivitas CSR dianggap menjadi suatu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan (Ghozali dan Chariri, 2007) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis sosial dan lingkungan serta pengungkapan informasi sosial dan lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat. Namun demikian, Gray (1995) dalam Salama *et al.*, (2010) mengemukakan motivasi tersendiri dari manajer dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Gray (1995) menyatakan bahwa manajer yang terlibat dalam praktek EM cenderung untuk menggunakan mekanisme pengungkapan sosial dan lingkungan untuk melegitimasi organisasi, terutama dengan para pemangku kepentingan sosial dan politik.

2.1.4 Corporate Social Responsibility

Istilah Corporate Social Responsibility (CSR) dipopulerkan oleh John Elkington (1997) melalui bukunya "*Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. Melalui konsep ini Elkington (1997) mengemukakan bahwa perusahaan yang

ingin menjaga kelangsungan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Hal tersebut berarti bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (*profit*), tetapi mereka juga harus terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat (*people*), serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

memberikan definisi yang lebih luas mengenai CSR :

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.

Berdasarkan pengertian tersebut, CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi, serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan dan keluarga mereka serta komunitas setempat ataupun masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

2.1.5 Pengungkapan CSR

Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan yang berkualitas mengenai informasi keuangan dan informasi lain yang relevan

bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Kualitas informasi dapat dilihat dari sejauh mana luas pengungkapan laporan yang diterbitkan perusahaan. Ada tiga konsep yang umumnya diungkapkan yaitu *adequate*, *fair* dan *full disclosure* (Hendrikson, 2001). *Adequate disclosure* mengandung arti yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, sehingga informasi tersebut tidak menyesatkan investor. *Fair disclosure* merupakan pengungkapan yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang layak. *Full disclosure* (pengungkapan penuh) diartikan sebagai penyediaan semua informasi yang dianggap cukup penting dalam mempengaruhi penilaian dan keputusan yang akan diambil pengguna laporan keuangan. Konsep pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*) merupakan konsep pengungkapan yang paling umum digunakan dari ketiga konsep lainnya (Ghozali dan Chariri, 2007).

Surat keputusan BAPEPAM No. Kep- 38/PM/1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang secara wajib harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Kedua adalah pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada.

Pengungkapan CSR merupakan bagian dari pengungkapan yang bersifat mandatory, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) yang menjelaskan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun demikian, item-item pengungkapannya masih menjadi informasi yang bersifat *voluntary* (Cheng dan Christiawan, 2011).

Dalam mengukur pengungkapan CSR, penelitian ini menggunakan standar *Global Reporting Initiative (GRI)*. *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus- menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga pernah digunakan oleh Dahli dan Siregar (2008). Indikator GRI yang digunakan termasuk: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item).

2.1.6 Earnings Management

Sulistyanto (2008) yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajer untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Watts dan Zimmermann (1986) menjelaskan berbagai motivasi yang mendorong tindakan manajemen laba, yaitu:

(1) hipotesis program bonus, yang didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer sehingga akan mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini; (2) hipotesis perjanjian utang, yang disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial; (3) hipotesis biaya politik, yang timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Secara umum, Sulistyanto (2008) menjelaskan ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat (*aggregate accruals*), akrual khusus (*specific accruals*), dan distribusi laba (*distribution of earnings*).

1. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), De Angelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995)
2. Model berbasis specific akrual, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNicholas dan Wilson, Petroni, Beaver, dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols.

3. Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model berbasis akrual. Penggunaan model tersebut karena sejauh ini hanya model berbasis akrual yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini digunakan dalam dunia usaha.

2.1.7 Corporate Governance

Secara definitif *corporate governance* diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya* (Sulistyanto, 2008). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan *corporate governance* sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. *Corporate governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan.

Dalam pelaksanaannya, KNKG menyusun suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam penerapan *corporate governance*. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan azas- azas *corporate governance* sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan *stakeholder* lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibility (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berbagai penelitian terkait dengan *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang meyakinkan *stakeholder* bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan mereka. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) berupa *internal mechanism* seperti: komposisi dewan direksi, komposisi komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta komite audit, (2) *external mechanism* seperti pengendalian oleh pasar, level debt financing, dan auditor eksternal (Barnhart dan Rosentein, 1998 dalam Herawaty 2008).

2.1.7.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (KNKG, 2006). Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*

Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen (non direktur eksekutif) yang bekerja dengan prinsip paruh waktu. Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 2.1

Stuktur Board of Director (BoD) dalam *One Tier System*



Sumber: FCGI (2005)

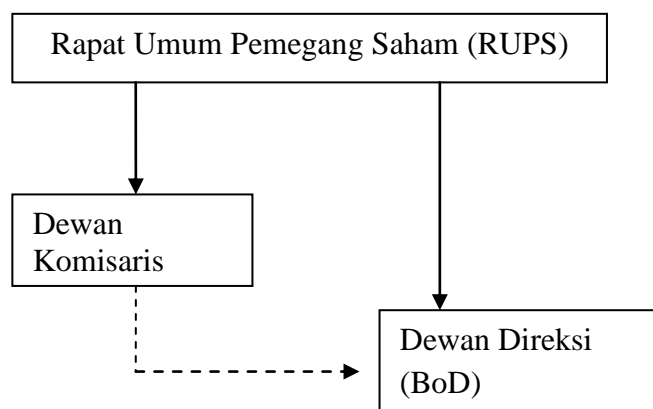
2. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*

Sistem dua tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Hal tersebut berarti bahwa dewan komisaris terutama

bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* ialah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia

Gambar 2.2

Struktur BoD dan BoC dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber: FCGI (2005)

Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 menyatakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek harus memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *good corporate governance* (GCG). Senada dengan hal tersebut, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengklasifikasikan dewan komisaris menjadi dua kelompok yaitu, komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Komisaris yang terafiliasi (non-independen) adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan pihak yang netral dalam perusahaan sehingga mampu bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan arahan/masukan kepada manajemen.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ yang dikutip oleh FCGI (2002). Peraturan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

2.1.7.2 Komite Audit

KNKG (2006) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya

tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan komite audit telah diatur sebelumnya dalam keputusan Bapepam-LK No. Kep-29/PM/2004 nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit.

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris guna memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

2.1.7.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional (>5%) seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (Skousen *et al.*, 2009). Kepemilikan saham institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Madiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa monitoring yang dilakukan oleh investor institusional tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Susanti (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Jiambavo *et al.*, (1996) yang menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional. Lebih lanjut, penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek *feedback* dari

kepemilikan instusional, yaitu dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *earnings management*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian empiris terdahulu terkait topik, antara lain:

1. Salama *et al.*, (2010) meneliti hubungan antara CED dan manajemen laba serta peran mekanisme CG terhadap asosiasi tersebut. Mekanisme CG yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, dan jumlah rapat komite audit. Dalam penelitian ini ada tiga variabel kontrol yaitu : ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 245 perusahaan non-keuangan di Inggris untuk tahun yang berakhir pada Maret 2007. Salama *et al.*, (2010) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara CED dan manajemen laba. Namun demikian, mereka menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Akan tetapi, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh pada asosiasi antara manajemen laba dengan CED.
2. Handajani *et al.*, (2008) menguji pengaruh *earnings management* dan struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan variabel *earning management* yang diukur dengan *discretionary accrual*, proporsi dewan direksi independen,

kepemilikan institusional, komite audit sebagai proksi struktur *corporate governance* dan profil perusahaan, tipe industri, *leverage* sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan publik yang terdaftar dalam BEI pada periode 2005-2007. Hasil dari penelitian ini adalah *Earning management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Begitu pula untuk variabel komite audit yang menjadi proksi *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

3. Midiastuty dan Machfoedz (2003) meneliti hubungan mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba. *Corporate governance* dalam penelitian ini terdiri dari : Kepemilikan manajerial, kepemilikan insitusional dan ukuran dewan direksi. Penelitian ini menggunakan sampel 85 perusahaan dari periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Midiastuty dan Machfoedz menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba, sedangkan ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan manajemen laba.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Analisis Statistik	Hasil Penelitian
1	Salama <i>et al</i> (2010)	Variabel independen: <i>-Earnings Management</i> Variabel dependen:	<i>OLS regression</i>	-Menemukan adanya hubungan yang tidak signifikan antara CED dan manajemen laba.

		<p><i>-Corporate Environmental Disclosure</i></p> <p>Variabel Moderating: <i>-Corporate Governance (board size and the number of comitte audit meetings)</i></p>		<p>-Jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba.</p> <p>-Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh pada asosiasi antara manajemen laba dengan CED.</p>
2	Handajani et al., (2008)	<p>Variabel Independen: <i>-Earnings Management</i> <i>-Corporate Governance Mechanism (Proportion of independent board of director, institusional ownership, and audit commite)</i></p> <p>Variabel dependen: <i>-Corporate Social Responsibility Disclosure</i></p>	<i>Multiple regression</i>	<p><i>-Earnings management</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan.</p> <p>-Komite audit yang menjadi proksi <i>corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p>
3	Midiastuty dan Machfoedz (2003)	<p>Variabel independen: <i>-Corporate Governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi)</i></p> <p>Variabel dependen: <i>-Earnings management</i> <i>-kualitas laba</i></p>	<i>OLS regression</i>	<p>-Menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba</p> <p>-Ukuran dewan direksi berhubungan positif dengan manajemen laba. -kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan kualitas laba</p>

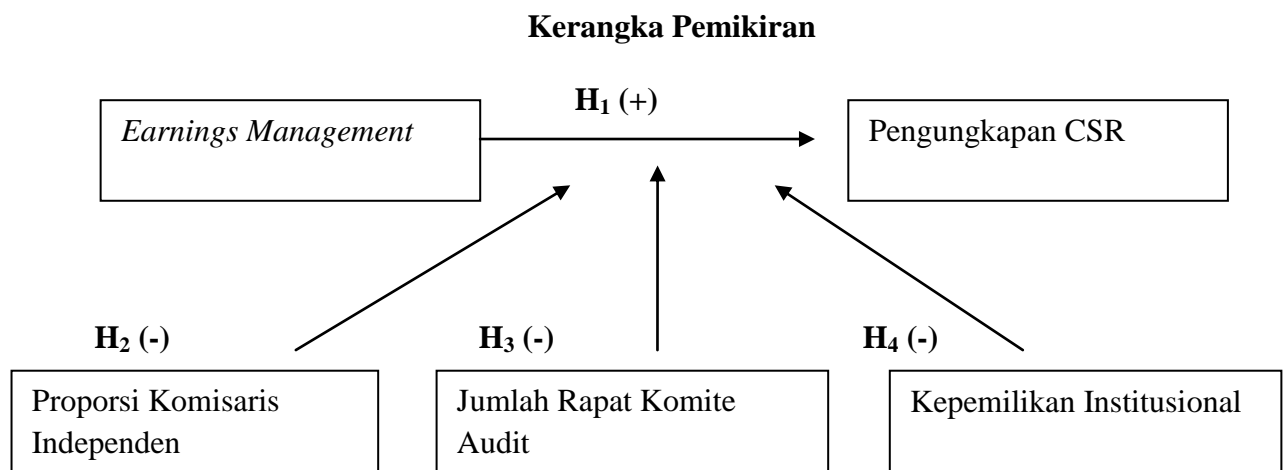
Sumber : diringkas dari berbagai jurnal

2.3 Kerangka Pemikiran

Earnings management (EM) merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan manajer dalam mengelola laba. Praktek EM yang dilakukan manajer menanggung risiko tertentu, image perusahaan menjadi buruk di mata *stakeholder* ketika perusahaan terbukti melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas seperti pengungkapan CSR guna menutupi/mengalihkan perhatian *stakeholder* dari isu praktek EM yang dilakukan (Prior *et al.*, 2010). Salama *et al.*, (2010) menyatakan bahwa aktivitas CSR dan pengungkapan yang dilakukan manajer dengan motivasi untuk menutupi praktek EM dapat diminimalisir oleh mekanisme *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengawasan atas tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini antara lain proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan telaah pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.3



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan CSR

Earning management atau manajemen laba merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa perilaku oportunistik tersebut berawal dari adanya asimetri informasi serta perbedaan kepentingan antara manajer dan pihak eksternal. Manajer melakukan praktik tersebut untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan pribadi. Perilaku oportunistik manajer dalam melakukan manajemen laba memiliki pengaruh negatif bagi berbagai pihak. Zahra *et al.*, (2005) dalam Prior *et al.*, (2010) menyatakan bahwa tindakan-tindakan manajerial yang dengan sengaja menyamarkan nilai sebenarnya dari aset perusahaan, transaksi, atau posisi keuangan, memiliki konsekuensi negatif bagi pemegang saham, karyawan, masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, masyarakat luas, reputasi manajer, keamanan kerja dan kelangsungan karir manajer.

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan metode yang berbeda seperti rencana kompensasi atau pengungkapan sukarela untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Salama *et al.*, 2010). Aktivitas CSR yang diungkapkan oleh perusahaan mampu melegitimasi aktivitas perusahaan dimata masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). Semakin banyak item CSR yang diungkapkan perusahaan secara sukarela akan semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Pengungkapan CSR dapat

memberikan transparansi atas dampak kegiatan operasional perusahaan maupun kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat maupun *stakeholder* lainnya.

Pengungkapan CSR yang dilakukan dalam suatu perusahaan tidak hanya untuk menunjukkan kepedulian serta melegitimasi aktivitas perusahaan terhadap *stakeholder*, namun pengungkapan CSR digunakan untuk melindungi posisi dan menjaga kepentingan manajer. Manajer yang terlibat dalam EM cenderung menyadari bahwa mekanisme pengungkapan CSR sebagai suatu strategi dalam mempertahankan legitimasi perusahaan, terutama dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Prior *et al* (2010) yang menemukan bahwa manajer yang terlibat dalam manipulasi laba berusaha untuk mengkompensasinya dengan melibatkan perusahaan dalam kegiatan CSR guna menghindari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor maupun *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, manajer yang melakukan EM memiliki insentif dalam membuat pengungkapan yang lebih luas dan informatif, seperti pengungkapan CSR agar reputasi perusahaan tetap terjaga. Senada dengan hal tersebut penelitian yang dilakukan oleh Handajani *et al.*, (2008) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dari perilaku *earnings management* terhadap CSR *disclosure*. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : *Earnings management* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR

2.4.2 Peran Mekanisme *Corporate Governance* Dalam Memoderasi Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan CSR

Corporate Governance merupakan suatu sistem pengawasan dan pengendalian aktivitas pengelolaan sebuah perusahaan. Sistem pengawasan dan

pengendalian yang baik akan mendorong manajer untuk selalu mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Dengan kata lain, *corporate governance* merupakan upaya untuk mengeliminir manajemen laba dalam suatu perusahaan. Penerapan mekanisme *corporate governance* akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Klein (2002) menyatakan bahwa peningkatan keandalan dan kualitas laba akuntansi terjadi ketika perilaku oportunistik manajerial dipantau oleh mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang kuat dalam sebuah perusahaan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk menyembunyikan, mengubah atau menunda informasi yang seharusnya diketahui oleh publik (Sulistyanto, 2008).

Corporate governance mampu mengendalikan tindakan oportunistik manajer yang berusaha mengalihkan isu tersebut dengan aktif dalam kegiatan CSR (Salama *et al.*, 2010). Mekanisme *corporate governance* yang baik harus dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham dan kreditor melalui mekanisme internal maupun eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* diprosikan oleh proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional.

2.4.2.1 Peran Komisaris Independen Dalam Memoderasi Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan CSR

KNKG (2006) menjelaskan bahwa komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengawasi aktivitas pengelolaan perusahaan. Sikap independensi dari pihak luar serta memiliki tujuan untuk kepentingan perusahaan menjadikan keberadaan dewan komisaris independen sangatlah penting bagi kelangsungan perusahaan. Komisaris Independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek-praktek yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas pengelola perusahaan termasuk perilaku oportunistik seperti manajemen laba. Hal tersebut didukung oleh penelitian Klein (2002) membuktikan bahwa besarnya *discretionary accrual* lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari komisaris independen yang jumlahnya sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian Dechow *et al.*,(1996) yang menemukan bahwa perusahaan memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan manipulasi laba apabila dewan komisaris didominasi oleh jajaran manajemen.

Herawaty (2008) menyatakan bahwa komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan semakin meminimalisir tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Xie *et al.*, (2003) menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen yang lebih berpengalaman akan mengurangi tindakan manajemen laba yang melakukan pengalihan isu pada

tanggung jawab sosial perusahaan. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H2 : Proporsi komisaris independen memoderasi hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR

2.4.2.2 Peran Jumlah Rapat Komite Audit Dalam Memoderasi Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan CSR

Dalam menjalankan tugasnya komite audit harus melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance*. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Ebrahim (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh dalam mengurangi tindakan manajemen laba. Lebih lanjut Ebrahim menyatakan bahwa hubungan tersebut menjadi lebih kuat ketika komite audit lebih aktif. Sejalan dengan hal tersebut Xie *et al* (2003) membuktikan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar guna memantau *discretionary accrual* jangka pendek. Hal tersebut berarti bahwa semakin rutin komite audit mengadakan pertemuan maka semakin kecil potensi manajer yang melakukan praktek EM dengan memperluas pengungkapan CSR untuk mengelabui *stakeholder*.

Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Jumlah rapat komite audit memoderasi hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR

2.4.2.3 Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Pengungkapan CSR

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Hal tersebut sejalan dengan penemuan Bushee (1998) dalam Murwaningsari (2008) yang membuktikan bahwa investor institusional mampu mengurangi insentif bagi perilaku oportunistik manajer dengan memberikan derajat monitoring yang lebih tinggi terhadap perilaku manajerial dibandingkan investor lainnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Cornet *et al.*, (2006) yang menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menemukan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional maka semakin kecil kesempatan manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba. Hal tersebut berarti bahwa investor institusional terbukti efektif dalam melakukan monitoring

dan pengendalian terhadap perilaku manajer. Jiambavo *et al* (1996) menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan institusional. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek *feedback* dari kepemilikan instusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi *earnings management*.

Berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajer yang mencoba melakukan praktek EM dengan memperluas pengungkapan CSR untuk menghindari tindakan pengawasan dari *stakeholder*. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan:

H4: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *earnings management* dan pengungkapan CSR

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel moderating, variabel dependen, dan variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *earnings management*. variabel moderating dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate governance yang diprosikan oleh proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR, sedangkan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Definisi operasional setiap variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Varibel penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Earnings Management (X1)	Teori Agensi	Discretionary Accrual	Skala Rasio
Proporsi Komisaris Independen (X2)	Teori Agensi	Perbandingan total komisaris independen terhadap total komisaris	Skala Rasio
Jumlah Rapat Komite Audit (X3)	Teori Agensi	Laporan Tahunan pada bagian corporate governance	Skala Rasio

Kepemilikan Institusional (X4)	Teori Agensi	Perbandingan presentase kepemilikan institusional terhadap presentase total saham yang beredar	Skala Rasio
Pengungkapan CSR (Y)	Teori Stakeholder dan Teori Legitimasi	Indeks Global Reporting Initiative (GRI)	Skala Rasio

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba (*earnings management*). *Earnings management* merupakan perilaku oportunistik manajer dalam melakukan tindakan diskresioner atas laba yang dilaporkan guna memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Healy dan Wahlen (1999, hal 366) menyatakan bahwa situasi manajemen laba (EM) terjadi ketika para manajer "menyesatkan beberapa *stakeholder* mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada pelaporan angka akuntansi". Dalam penelitian ini *earnings management* menggunakan proksi *discretionary accrual*. Model untuk mengukur *earnings management* yang menggunakan proksi *discretionary accrual* salah satunya adalah model modified Jones (Dechow *et al.*, 1995 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007)

Tahap-tahap penentuan *discretionary accrual* adalah seperti berikut:

- (1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*), yaitu :

$$\mathbf{TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}} \quad \mathbf{(1)}$$

Keterangan:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

- (2) Menentukan koefisien dari regresi akrual.

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDACC). Langkah awal untuk menentukan *nondiscretionary accrual* yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{TACC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1 (1/TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it}-\Delta REC_{it})/TA_{it-1})} \\ \mathbf{+\beta_3(PPE_{it}/TA_{it-1}) + \beta_4 (ROA_{it-1}/ TA_{it-1})+ e} \quad \mathbf{(2)}$$

Keterangan:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t (yang dihasilkan dari perhitungan nomor 1 di atas)

TA_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = *Property, plant and equipment* perusahaan i pada tahun t

ROA_{it-1} = *Return on assets* perusahaan i pada akhir tahun t-1

(3) Menentukan *nondiscretionary accrual*.

Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien β_1 , β_2 , β_3 dan β_4 .

Koefisien β_1 , β_2 , β_3 dan β_4 tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accrual* melalui persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{NDACC}_{it} = & \beta_1(1/\text{TA}_{it-1}) + \beta_2((\Delta \text{REV}_{it} - \Delta \text{REC}_{it})/\text{TA}_{it-1}) + \beta_3(\text{PPE}_{it}/\text{TA}_{it-1}) \\ & + \beta_4(\text{ROA}_{it-1}/\text{TA}_{it-1}) + e \end{aligned} \quad (3)$$

Keterangan:

NDACC_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

e = Error

(4) Menentukan *discretionary accrual*.

Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian *discretionary accrual* bisa dihitung dengan mengurangkan total akrual (hasil perhitungan di (1)) dengan *nondiscretionary accrual* (hasil perhitungan di (3)).

$$\text{DACC}_{it} = (\text{TACC}_{it}/\text{TA}_{it-1}) - \text{NDACC}_{it} \quad (4)$$

Keterangan:

DACC_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

3.1.2 Variabel Moderating

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali,

2009). Dalam penelitian ini *corporate governance* digunakan sebagai variabel moderating antara pengaruh *earnings management* terhadap pengungkapan CSR. *Corporate governance* merupakan suatu susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FGCI, 2002). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan proporsi komisaris independen, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional.

1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen dapat bertindak penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberi nasihat kepada manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen dihitung dengan cara:

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

2. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat komite audit

mampu meningkatkan tindakan monitoring/pengawasan terhadap perilaku manajemen (Xie *et al.*, 2003). Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi antara lain bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

3.1.3 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lainnya (Ghozali, 2009). Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan bagian dari akuntansi pertanggung jawaban sosial yang mengkomunikasikan informasi sosial kepada *stakeholder* (Cheng dan Christiawan, 2011). Menurut Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Ludovicus (2007) menyatakan bahwa pengungkapan informasi

CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomis dan politis. Selain itu, akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

Pengungkapan CSR dapat diperoleh dari annual report maupun melalui *sustainability report* (laporan keberlanjutan) yang biasanya terpisah. Pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks *Global Reporting Initiative* (GRI). Penilaian menggunakan indeks GRI telah dipakai oleh kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara (Nuraini, 2010). Di tahun 2002, GRI diadopsi oleh UN dan *The UN Global Compact* seperti yang disebutkan dalam dokumen EU dalam Kerangka CSR Eropa. Indeks ini memiliki format dan isi laporan yang paling lengkap dalam menyediakan informasi. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9item). Dalam penelitian ini, pengungkapan item CSR dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh

faktor luar yang tidak diteliti (Jogiyanto, 2004). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

3.1.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai buku total aset})$$

3.1.4.2 Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor baik pemegang obligasi maupun pemegang saham (Riyanto, 2001). Rasio ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. *Return on asset* merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat kembalian

investasi (return) semakin besar. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak (EAT)}}{\text{Total aktiva}}$$

Kedua variabel yang digunakan untuk mengukur ROA tersebut (EAT dan total investasi aktiva operasi) tercermin dalam laporan keuangan tahunan, besarnya EAT diperoleh dari laporan laba rugi, sedangkan total asset yang digunakan dalam penelitian ini adalah total aktiva tetap yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan yang tercermin dalam laporan neraca (sisi aktiva/ asset).

3.1.4.3 *Leverage*

Rasio *leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak dibiayai oleh investor atau kreditur luar. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. Rasio *leverage* dalam penelitian ini diukur dengan membagi total utang dengan jumlah aktiva perusahaan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penggunaan sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini

karena perusahaan manufaktur lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan atas kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode tahun 2008 - 2010, dengan alasan: pada 20 Juli 2007 telah dikeluarkan UU PT No. 40 yang didalamnya memuat kewajiban pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baru berlaku secara efektif pada akhir tahun 2007. Dengan demikian, peneliti menggunakan laporan tahunan periode 2008-2010 karena pada tahun tersebut perusahaan dianggap telah mampu dan siap untuk melakukan pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode *purposive sampling* yaitu merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu (Ghozali, 2009). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008-2010.
2. Menyediakan laporan tahunan maupun *sustainability report* (laporan keberlanjutan) lengkap selama tahun 2008-2010.
3. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari *database* pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomika dan bisnis UNDIP Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan studi dokumentasi yaitu dengan mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek-aspek atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini. Data Laporan Keuangan dan *annual report* yang termasuk sampel diperoleh dari BEI. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian Global Reporting Initiative (GRI) berupa *check list* atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan informasi lingkungan perusahaan

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan dengan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka, maka pengumpulan angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif (Dajan, 1996).

Analisis kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Supranto,

1998). Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametric dengan basis Windows (Ghozali, 2009). Teknik analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (*Best Linear Unbiased Estimator*).

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai mekanisme *corporate governance*, *earnings management* dan pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan perhitungan statistik regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, maka diadakan pengujian asumsi klasik. Menurut Ghozali (2009) uji asumsi klasik terdiri dari:

3.5.2. 1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi maka digunakanlah uji Kolmogorof Smirnov dan analisis grafik.

Dasar pengambilan keputusan analisis statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S) adalah (Ghozali, 2009):

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik adalah (Ghozali, 2006):

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2. 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance*

Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- 2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.5.2. 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan

nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam menguji adanya heteroskedastisitas dipergunakan pula uji statistik guna mendapatkan hasil yang lebih akurat. Penelitian ini menggunakan Uji Glejser untuk memperkuat hasil scatter plot dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas.

3.5.2. 4. Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas.

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi

digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2007). Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Dalam penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$CSR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DA_{it} + \alpha_2 SIZE_{it} + \alpha_3 LEV_{it} + \alpha_4 ROA_{it} + e \dots \dots \dots (1)$$

$$CSR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DA_{it} + \alpha_2 INKOM_{it} + \alpha_3 RADIT_{it} + \alpha_4 KEPINS_{it} + \alpha_5 DA * INKOM_{it} + \alpha_6 DA * RADIT_{it} + \alpha_7 DA * KEPINS_{it} + \alpha_8 SIZE_{it} + \alpha_9 LEV_{it} + \alpha_{10} ROA_{it} + e \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- CSR_{it} = *Corporate Social Responsibility disclosure*
- α_0 = Konstanta
- $\alpha_1 - \alpha_7$ = Koefisien
- DA_{it} = Manajemen laba diproksi dengan *discretionary accrual (DA)*.
- $INKOM_{it}$ = Proporsi dewan komisaris independen
- $RADIT_{it}$ = Jumlah rapat komite audit
- $KEPINS_{it}$ = Kepemilikan Institusional
- $SIZE_{it}$ = Ukuran perusahaan dihitung dengan log total aset
- LEV_{it} = Rasio *Leverage (Debt to Asset Ratio)*
- ROA_{it} = Profitabilitas diproksi dengan *Return On Asset*

3.5.4. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji-t sementara pengujian secara bersama-sama dilakukan dengan uji-F pada level 5% ($\alpha = 0,05$) (Ghozali, 2009).

3.5.4. 1. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama.

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 17.0. jika angka signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3.5.4. 2. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel terikat.

- a. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- b. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 17.0. jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.4. 3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009).